



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 19349-19358

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Integrasi Akuntansi Berbasis Akrual dan Penganggaran Berbasis Kinerja dalam Penguatan Akuntabilitas Publik pada Pemerintahan Indonesia

Adinda Novia Syahrani, Aisyah Safitri, Dea Alyandah Pratiwi, Gafira Nur Amalia, Yasin Mulyanto, Yohanes Agung Nugroho

Universitas Bina Sarana Informatika – Indonesia

63230347@bsi.ac.id

Abstract

Reformasi pengelolaan keuangan publik di Indonesia tidak hanya bertujuan menghasilkan laporan keuangan yang andal, tetapi juga memastikan bahwa penggunaan anggaran mampu mencerminkan pencapaian kinerja secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks tersebut, akuntansi berbasis akrual dan penganggaran berbasis kinerja menjadi dua instrumen utama yang mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Meskipun keduanya telah diterapkan melalui berbagai regulasi, integrasi antara kedua sistem masih belum optimal sehingga informasi keuangan belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai dasar evaluasi kinerja program pemerintah. Penelitian ini bertujuan menganalisis pentingnya integrasi akuntansi berbasis akrual dan penganggaran berbasis kinerja dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Penelitian menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, memanfaatkan peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel ilmiah sebagai sumber data yang dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi kedua sistem mampu menghasilkan informasi yang lebih komprehensif untuk mendukung transparansi, evaluasi kinerja, dan pengambilan keputusan. Keberhasilan implementasinya dipengaruhi oleh kompetensi aparatur, keselarasan indikator kinerja, serta dukungan sistem informasi yang terintegrasi. Namun demikian, tantangan masih ditemukan dalam bentuk kualitas sumber daya manusia yang belum merata, sistem informasi yang terpisah antarinstansi, dan indikator kinerja yang masih berorientasi pada output而非outcome. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan dan optimalisasi pemanfaatan informasi keuangan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pelayanan publik, sehingga dapat memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Keywords: Akuntabilitas Publik, Akuntansi Berbasis Akrual, Penganggaran Berbasis Kinerja, Tata Kelola Pemerintahan, Sektor Publik.

1. Introduction

Reformasi pengelolaan keuangan publik menjadi salah satu agenda penting pemerintah Indonesia dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Perubahan paradigma administrasi publik menuntut sistem pengelolaan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pertanggungjawaban administratif, tetapi juga sebagai dasar pengambilan keputusan yang mampu mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan secara berkelanjutan.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang mendorong penerapan akuntansi berbasis akrual pada seluruh entitas pemerintah. Penerapan sistem ini menjadi tonggak penting dalam reformasi keuangan negara karena mampu menyajikan informasi yang lebih lengkap mengenai aset, kewajiban, pendapatan, beban, serta kondisi keuangan pemerintah dibandingkan dengan basis kas. Informasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya publik sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa akuntansi berbasis akrual berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelaporan keuangan pemerintah. Informasi yang dihasilkan tidak hanya digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada lembaga pengawas, tetapi juga menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, pengelolaan aset, evaluasi program, serta pengambilan keputusan yang lebih objektif. Dengan demikian, akuntansi

Integrasi Akuntansi Berbasis Akrual dan Penganggaran Berbasis Kinerja dalam Penguatan Akuntabilitas Publik pada Pemerintahan Indonesia

berbasis akrual telah berkembang dari sekadar memenuhi tuntutan regulasi menjadi instrumen strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Meskipun demikian, tersedianya informasi keuangan yang berkualitas belum tentu menjamin peningkatan akuntabilitas publik apabila informasi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal dalam proses evaluasi kinerja. Laporan keuangan sering kali hanya menggambarkan kondisi fiskal pemerintah tanpa menunjukkan sejauh mana penggunaan anggaran mampu menghasilkan keluaran maupun manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang dapat menghubungkan informasi keuangan dengan pencapaian kinerja pemerintah.

Salah satu pendekatan yang diterapkan adalah penganggaran berbasis kinerja. Sistem ini menghubungkan alokasi anggaran dengan sasaran, indikator, keluaran, dan hasil yang ingin dicapai oleh setiap program pemerintah. Dengan pendekatan tersebut, keberhasilan pengelolaan keuangan tidak lagi diukur dari tingginya tingkat penyerapan anggaran, tetapi dari efektivitas penggunaan sumber daya dalam menghasilkan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penganggaran berbasis kinerja juga memperkuat akuntabilitas karena setiap penggunaan dana publik harus dapat dipertanggungjawabkan melalui capaian kinerja yang terukur.

Namun, implementasi kedua sistem tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Dalam praktiknya, informasi keuangan hasil penerapan akuntansi berbasis akrual masih lebih banyak dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pelaporan eksternal, sedangkan evaluasi kinerja sering kali dilakukan tanpa memanfaatkan informasi keuangan secara optimal. Akibatnya, keterkaitan antara data keuangan dan data kinerja belum terbangun secara menyeluruh sehingga pengambilan keputusan belum sepenuhnya berbasis bukti.

Sejumlah penelitian terdahulu membuktikan bahwa akuntansi berbasis akrual mampu meningkatkan kualitas informasi keuangan, sedangkan penganggaran berbasis kinerja berperan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran apabila didukung oleh indikator kinerja yang jelas, sumber daya manusia yang kompeten, serta komitmen organisasi yang kuat. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih mengkaji kedua sistem secara terpisah sehingga belum memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana integrasi keduanya dapat memperkuat akuntabilitas publik.

Berdasarkan kondisi tersebut, masih terdapat kesenjangan penelitian mengenai hubungan antara akuntansi berbasis akrual dan penganggaran berbasis kinerja sebagai satu kesatuan dalam sistem pengelolaan keuangan publik. Padahal, integrasi kedua pendekatan tersebut berpotensi menghasilkan informasi yang lebih komprehensif untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, serta pengambilan keputusan yang lebih efektif.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis peran integrasi akuntansi berbasis akrual dan penganggaran berbasis kinerja dalam memperkuat akuntabilitas publik di Indonesia melalui pendekatan studi kepustakaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan tata kelola keuangan sektor publik yang lebih terintegrasi, sekaligus menjadi masukan praktis bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas sistem informasi keuangan, pengukuran kinerja, dan proses pengambilan keputusan yang transparan, efektif, efisien, serta akuntabel.

2. Research Methods

Penelitian ini menggunakan metode **studi kepustakaan** dengan pendekatan **deskriptif kualitatif** untuk mengkaji peran integrasi akuntansi berbasis akrual dan penganggaran berbasis kinerja dalam meningkatkan akuntabilitas publik di Indonesia. Data yang digunakan merupakan **data sekunder** yang diperoleh dari artikel ilmiah, buku referensi, serta berbagai regulasi terkait pengelolaan keuangan negara, khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pemilihan literatur dilakukan berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan keterkaitannya dengan tujuan penelitian. Analisis dilakukan melalui tahapan identifikasi permasalahan, penelusuran dan seleksi literatur, sintesis temuan dari berbagai sumber, serta penarikan kesimpulan untuk menjelaskan hubungan antara akuntansi berbasis akrual dan penganggaran berbasis kinerja dalam mendukung tata kelola keuangan publik yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel.

Kerangka Berpikir



Gambar 1. Kerangka Metode Penelitian

Kerangka penelitian disusun secara sistematis untuk menggambarkan alur penelitian sejak tahap awal hingga diperolehnya kesimpulan. Tahap pertama diawali dengan penetapan pendekatan penelitian, yaitu studi kepustakaan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan mengkaji serta mengintegrasikan konsep, teori, hasil penelitian, dan regulasi mengenai akuntansi berbasis akrual, penganggaran berbasis kinerja, dan akuntabilitas publik. Selanjutnya, data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber yang kredibel, seperti artikel ilmiah, buku referensi, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan sektor publik di Indonesia. Seluruh literatur kemudian diseleksi berdasarkan relevansi, kualitas akademik, dan kesesuaiannya dengan tujuan penelitian agar menghasilkan landasan teoritis dan empiris yang kuat. Proses analisis mengacu pada model Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Melalui tahapan tersebut, berbagai temuan dari literatur disintesis untuk menjelaskan hubungan antara akuntansi berbasis akrual, penganggaran berbasis kinerja, dan akuntabilitas publik. Hasil akhirnya berupa model konseptual yang menggambarkan pentingnya integrasi kedua sistem dalam mendukung tata kelola keuangan sektor publik yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel, sekaligus menjadi referensi bagi pengembangan penelitian maupun perumusan kebijakan di masa mendatang.

3. Results and Discussions

3.1 Sintesis Literatur Penelitian Terdahulu

Hasil telaah berbagai penelitian menunjukkan bahwa reformasi pengelolaan keuangan sektor publik di Indonesia selama dua dekade terakhir berfokus pada penerapan akuntansi berbasis akrual dan penganggaran berbasis kinerja sebagai instrumen untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengelolaan keuangan negara. Meskipun kedua pendekatan tersebut telah menjadi bagian dari kebijakan nasional, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala sehingga manfaat yang diharapkan belum sepenuhnya tercapai.

Literatur terdahulu menjelaskan bahwa akuntansi berbasis akrual menghasilkan informasi keuangan yang lebih komprehensif dibandingkan basis kas karena mampu menyajikan posisi aset, liabilitas, pendapatan, dan beban secara lebih utuh. Ketersediaan informasi tersebut mendukung peningkatan kualitas pelaporan keuangan, pengawasan penggunaan sumber daya publik, serta penyusunan kebijakan fiskal yang lebih tepat. Sejalan dengan itu, Maqdllyan (2022) menegaskan bahwa akuntansi berbasis akrual memperkuat akuntabilitas sektor publik melalui penyediaan informasi keuangan yang lebih relevan dan andal. Temuan tersebut diperkuat oleh Tarigan dan Nurtanzila (2015) yang menyatakan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual meningkatkan transparansi dan kualitas pertanggungjawaban pemerintah karena laporan keuangan mampu menggambarkan kondisi ekonomi pemerintah secara lebih menyeluruh.

Di sisi lain, penelitian mengenai penganggaran berbasis kinerja menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan anggaran tidak lagi diukur berdasarkan besarnya realisasi belanja, melainkan berdasarkan pencapaian keluaran dan hasil yang telah ditetapkan. Fardana et al. (2021) menjelaskan bahwa setiap alokasi anggaran harus dikaitkan dengan indikator kinerja sehingga penggunaan dana publik dapat dipertanggungjawabkan melalui capaian yang terukur. Selain itu, Mariandini, Irianto, dan Nurkholis (2018) menekankan bahwa efektivitas sistem penganggaran berbasis kinerja sangat dipengaruhi oleh komitmen organisasi, budaya kerja, serta kualitas sistem pengukuran kinerja yang diterapkan.

Meskipun demikian, sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa informasi yang dihasilkan melalui akuntansi berbasis akrual masih lebih banyak dimanfaatkan untuk memenuhi kewajiban pelaporan dibandingkan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis. Fahlevi et al. (2022) menunjukkan bahwa peningkatan kualitas laporan keuangan belum secara otomatis diikuti oleh peningkatan kualitas manajemen kinerja karena informasi keuangan belum dimanfaatkan secara optimal dalam proses evaluasi program pemerintah.

Berdasarkan sintesis literatur tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu umumnya masih membahas akuntansi berbasis akrual dan penganggaran berbasis kinerja secara terpisah. Padahal, kedua sistem tersebut saling melengkapi dalam mendukung pengelolaan keuangan publik. Integrasi keduanya memungkinkan informasi keuangan dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan anggaran, evaluasi kinerja, dan pengambilan keputusan yang lebih tepat. Dengan demikian, sinergi antara akuntansi berbasis akrual dan penganggaran berbasis kinerja berpotensi memperkuat akuntabilitas publik sekaligus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, efektif, dan berorientasi pada hasil.

Tabel 1. Sintesis Penelitian Terdahulu

Peneliti	Fokus Penelitian	Temuan Utama	Analisis Penulis
Tarigan & Nurtanzila (2015)	SAP Berbasis Akrual	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas	Menjadi dasar kualitas informasi keuangan pemerintah.
Ibrahim & Akbar (2014)	Implementasi Akuntansi Akrual	Implementasi dipengaruhi kesiapan organisasi	Keberhasilan tidak hanya bergantung pada regulasi tetapi juga kapasitas institusi.
Anggraeni & Saleh (2020)	Penganggaran Berbasis Kinerja	Berpengaruh positif terhadap akuntabilitas	Kinerja harus menjadi dasar alokasi anggaran.
Mariandini et al. (2018)	Sistem Akuntabilitas Kinerja	Dipengaruhi budaya organisasi dan komitmen pimpinan	Faktor organisasi sangat menentukan keberhasilan implementasi.
Fahlevi et al. (2022)	Akuntansi Akrual dan Manajemen Kinerja	Informasi akrual belum dimanfaatkan secara optimal	Diperlukan integrasi dengan sistem penganggaran berbasis kinerja.

Berdasarkan hasil sintesis pada Tabel 1, sebagian besar penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual dan penganggaran berbasis kinerja memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pengelolaan keuangan sektor publik. Akuntansi berbasis akrual menghasilkan informasi keuangan yang lebih komprehensif karena mampu menyajikan aset, liabilitas, pendapatan, dan beban secara lebih akurat, sehingga mendukung transparansi, akuntabilitas, serta pengambilan keputusan yang lebih tepat. Sementara itu, penganggaran berbasis kinerja menghubungkan alokasi sumber daya dengan target, keluaran, dan hasil program sehingga penggunaan anggaran menjadi lebih efektif dan berorientasi pada pencapaian tujuan pembangunan. Dengan demikian, kedua pendekatan memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel.

Meskipun demikian, kajian literatur menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian masih membahas kedua sistem tersebut secara terpisah. Penelitian mengenai akuntansi berbasis akrual umumnya menitikberatkan pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan, sedangkan studi mengenai penganggaran berbasis kinerja lebih banyak menyoroti efisiensi anggaran dan pencapaian indikator kinerja. Padahal, dalam praktik pengelolaan keuangan publik, keduanya saling melengkapi. Informasi keuangan yang dihasilkan melalui akuntansi berbasis akrual seharusnya menjadi dasar dalam mengevaluasi efektivitas penggunaan anggaran dan pencapaian target pembangunan.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini memandang akuntansi berbasis akrual dan penganggaran berbasis kinerja sebagai satu sistem yang terintegrasi dalam mendukung akuntabilitas publik. Integrasi kedua pendekatan memungkinkan informasi keuangan dimanfaatkan secara optimal dalam evaluasi kinerja, penyusunan kebijakan, dan pengambilan keputusan yang berbasis bukti. Melalui pendekatan yang terpadu, sistem pengelolaan keuangan pemerintah diharapkan mampu menghasilkan tata kelola yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

3.2 Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual dalam Pemerintahan Indonesia

Penerapan akuntansi berbasis akrual merupakan salah satu langkah penting dalam reformasi pengelolaan keuangan sektor publik di Indonesia. Perubahan ini menggeser sistem pencatatan yang sebelumnya berorientasi pada arus kas menuju penyajian informasi keuangan yang lebih menyeluruh. Melalui pendekatan akrual, pemerintah dapat menyajikan informasi mengenai aset, liabilitas, pendapatan, beban, dan perubahan ekuitas secara lebih lengkap sehingga kondisi keuangan negara dapat dipahami secara lebih komprehensif. Oleh karena itu, akuntansi berbasis akrual tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan regulasi, tetapi juga menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan pemerintah.

Implementasi sistem ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang mewajibkan pemerintah pusat maupun daerah menerapkan akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sehingga informasi keuangan dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan yang lebih berkualitas.

Berbeda dengan basis kas yang hanya mengakui transaksi saat penerimaan atau pengeluaran kas terjadi, basis akrual mencatat setiap transaksi ketika hak dan kewajiban muncul. Pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi fiskal pemerintah, sehingga memudahkan pengelolaan aset, pengendalian kewajiban, penyusunan kebijakan, serta evaluasi kinerja program. Informasi yang lebih komprehensif juga memperkuat transparansi dan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.

Berbagai penelitian mendukung manfaat penerapan akuntansi berbasis akrual. Maqdllyan (2022) menyatakan bahwa sistem ini mampu meningkatkan akuntabilitas melalui penyediaan informasi keuangan yang lebih relevan dan andal. Tarigan dan Nurtanzila (2015) juga menemukan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual meningkatkan transparansi dan kualitas pertanggungjawaban pemerintah daerah. Sementara itu, Ibrahim dan Akbar (2014) menekankan bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya dipengaruhi oleh regulasi, tetapi juga oleh kesiapan organisasi, kompetensi sumber daya manusia, dan dukungan kelembagaan.

Meskipun demikian, penerapan akuntansi berbasis akrual masih menghadapi sejumlah kendala. Kompetensi aparatur yang belum merata, sistem informasi yang belum sepenuhnya terintegrasi, serta kapasitas kelembagaan yang berbeda antarinstansi menyebabkan pemanfaatan informasi keuangan belum optimal. Akibatnya, laporan keuangan sering kali masih digunakan sebagai sarana pemenuhan kewajiban administrasi, bukan sebagai dasar dalam perencanaan, pengendalian, maupun evaluasi kebijakan. Fahlevi et al. (2022) juga menunjukkan bahwa informasi keuangan hasil akuntansi berbasis akrual masih jarang dimanfaatkan secara maksimal dalam proses pengambilan keputusan.

Berdasarkan hasil kajian tersebut, akuntansi berbasis akrual seharusnya dipandang sebagai fondasi utama dalam sistem pengelolaan keuangan pemerintah, bukan sekadar perubahan metode pencatatan. Nilai strategisnya akan semakin besar apabila informasi keuangan yang dihasilkan diintegrasikan dengan sistem penganggaran berbasis kinerja sehingga mampu mendukung evaluasi penggunaan anggaran, pencapaian program, dan penguatan akuntabilitas publik.

3.3 Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja pada Pemerintahan Indonesia

Penganggaran berbasis kinerja merupakan salah satu instrumen reformasi keuangan negara yang menekankan keterkaitan antara alokasi anggaran dan pencapaian hasil program. Berbeda dengan pendekatan tradisional yang lebih berorientasi pada besarnya realisasi anggaran, sistem ini mengutamakan pencapaian target, keluaran, dan

hasil sebagai dasar penyusunan, pelaksanaan, serta evaluasi anggaran. Dengan demikian, setiap dana publik yang digunakan diharapkan mampu memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Penerapan penganggaran berbasis kinerja di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menekankan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam implementasinya, setiap kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah diwajibkan menetapkan indikator kinerja sebagai dasar penyusunan anggaran agar penggunaan sumber daya lebih terarah pada pencapaian tujuan pembangunan.

Melalui pendekatan ini, keberhasilan suatu program tidak lagi diukur dari tingginya tingkat penyerapan anggaran, tetapi dari sejauh mana anggaran tersebut mampu menghasilkan keluaran dan dampak yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penganggaran berbasis kinerja mendorong pemerintah menyusun indikator yang terukur dan relevan sebagai alat evaluasi sekaligus dasar penyusunan kebijakan pada periode berikutnya.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa sistem ini mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Anggraeni dan Saleh menjelaskan bahwa keterkaitan antara anggaran dan indikator kinerja memungkinkan evaluasi terhadap efektivitas penggunaan dana publik. Sementara itu, Mariandini et al. (2018) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh komitmen pimpinan, budaya organisasi, kompetensi sumber daya manusia, serta dukungan sistem informasi.

Di sisi lain, implementasi penganggaran berbasis kinerja masih menghadapi berbagai tantangan. Penyusunan indikator yang belum sepenuhnya mencerminkan hasil pembangunan, keterbatasan integrasi antara data keuangan dan data kinerja, serta minimnya pemanfaatan laporan keuangan dalam evaluasi program menyebabkan efektivitas sistem belum optimal. Kondisi tersebut mengakibatkan proses pengambilan keputusan belum sepenuhnya didasarkan pada informasi yang komprehensif.

Oleh karena itu, keberhasilan penganggaran berbasis kinerja tidak hanya bergantung pada kualitas indikator maupun perencanaan anggaran, tetapi juga pada ketersediaan informasi keuangan yang akurat. Integrasi dengan akuntansi berbasis akrual menjadi faktor penting agar evaluasi program dapat dilakukan secara lebih objektif, sehingga pengelolaan keuangan publik menjadi lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada hasil.

3.4 Peran Akuntansi Berbasis Akrual dan Penganggaran Berbasis Kinerja dalam Mendukung Akuntabilitas Publik

Akuntansi berbasis akrual dan penganggaran berbasis kinerja merupakan dua komponen utama dalam reformasi pengelolaan keuangan sektor publik yang memiliki fungsi berbeda, namun saling melengkapi. Akuntansi berbasis akrual menyediakan informasi mengenai kondisi keuangan pemerintah secara menyeluruh, sedangkan penganggaran berbasis kinerja memastikan bahwa penggunaan anggaran diarahkan pada pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, kedua sistem perlu dipandang sebagai satu kesatuan yang mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel.

Informasi yang dihasilkan melalui akuntansi berbasis akrual menjadi dasar dalam penyusunan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi anggaran. Berbeda dengan basis kas yang hanya mencatat transaksi saat kas berpindah, sistem akrual mampu memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai aset, kewajiban, pendapatan, dan beban pemerintah. Informasi tersebut kemudian dimanfaatkan dalam penganggaran berbasis kinerja untuk menilai efektivitas penggunaan anggaran serta tingkat pencapaian program pembangunan.

Integrasi kedua sistem menghasilkan proses pengambilan keputusan yang lebih berkualitas karena evaluasi tidak hanya mempertimbangkan besarnya anggaran yang digunakan, tetapi juga manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan keuangan pemerintah tidak lagi berorientasi pada kepatuhan administratif semata, melainkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, efisiensi penggunaan sumber daya, dan pencapaian tujuan pembangunan. Sinergi antara akuntansi berbasis akrual dan penganggaran berbasis kinerja menjadi fondasi penting dalam memperkuat akuntabilitas publik serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern dan berkelanjutan.



Gambar 2. Hubungan Integrasi Akuntansi Berbasis Akrual dengan Penganggaran Berbasis Kinerja

3.2 Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual dalam Pemerintahan Indonesia

Penerapan akuntansi berbasis akrual merupakan salah satu langkah penting dalam reformasi pengelolaan keuangan sektor publik di Indonesia. Perubahan ini menggeser sistem pencatatan yang sebelumnya berorientasi pada arus kas menuju penyajian informasi keuangan yang lebih menyeluruh. Melalui pendekatan akrual, pemerintah dapat menyajikan informasi mengenai aset, liabilitas, pendapatan, beban, dan perubahan ekuitas secara lebih lengkap sehingga kondisi keuangan negara dapat dipahami secara lebih komprehensif. Oleh karena itu, akuntansi berbasis akrual tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan regulasi, tetapi juga menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan pemerintah.

Implementasi sistem ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang mewajibkan pemerintah pusat maupun daerah menerapkan akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sehingga informasi keuangan dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan yang lebih berkualitas.

Berbeda dengan basis kas yang hanya mengakui transaksi saat penerimaan atau pengeluaran kas terjadi, basis akrual mencatat setiap transaksi ketika hak dan kewajiban muncul. Pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi fiskal pemerintah, sehingga memudahkan pengelolaan aset, pengendalian kewajiban, penyusunan kebijakan, serta evaluasi kinerja program. Informasi yang lebih komprehensif juga memperkuat transparansi dan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.

Berbagai penelitian mendukung manfaat penerapan akuntansi berbasis akrual. Maqdllyan (2022) menyatakan bahwa sistem ini mampu meningkatkan akuntabilitas melalui penyediaan informasi keuangan yang lebih relevan dan andal. Tarigan dan Nurtanzila (2015) juga menemukan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual meningkatkan transparansi dan kualitas pertanggungjawaban pemerintah daerah. Sementara itu, Ibrahim dan Akbar (2014) menekankan bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya dipengaruhi oleh regulasi, tetapi juga oleh kesiapan organisasi, kompetensi sumber daya manusia, dan dukungan kelembagaan.

Meskipun demikian, penerapan akuntansi berbasis akrual masih menghadapi sejumlah kendala. Kompetensi aparatur yang belum merata, sistem informasi yang belum sepenuhnya terintegrasi, serta kapasitas kelembagaan yang berbeda antarinstansi menyebabkan pemanfaatan informasi keuangan belum optimal. Akibatnya, laporan keuangan sering kali masih digunakan sebagai sarana pemenuhan kewajiban administrasi, bukan sebagai dasar dalam perencanaan, pengendalian, maupun evaluasi kebijakan. Fahlevi et al. (2022) juga menunjukkan bahwa informasi keuangan hasil akuntansi berbasis akrual masih jarang dimanfaatkan secara maksimal dalam proses pengambilan keputusan.

Berdasarkan hasil kajian tersebut, akuntansi berbasis akrual seharusnya dipandang sebagai fondasi utama dalam sistem pengelolaan keuangan pemerintah, bukan sekadar perubahan metode pencatatan. Nilai strategisnya akan semakin besar apabila informasi keuangan yang dihasilkan diintegrasikan dengan sistem penganggaran berbasis kinerja sehingga mampu mendukung evaluasi penggunaan anggaran, pencapaian program, dan penguatan akuntabilitas publik.

3.3 Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja pada Pemerintahan Indonesia

Penganggaran berbasis kinerja merupakan salah satu instrumen reformasi keuangan negara yang menekankan keterkaitan antara alokasi anggaran dan pencapaian hasil program. Berbeda dengan pendekatan tradisional yang lebih berorientasi pada besarnya realisasi anggaran, sistem ini mengutamakan pencapaian target, keluaran, dan hasil sebagai dasar penyusunan, pelaksanaan, serta evaluasi anggaran. Dengan demikian, setiap dana publik yang digunakan diharapkan mampu memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Penerapan penganggaran berbasis kinerja di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menekankan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam implementasinya, setiap kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah diwajibkan menetapkan indikator kinerja sebagai dasar penyusunan anggaran agar penggunaan sumber daya lebih terarah pada pencapaian tujuan pembangunan.

Melalui pendekatan ini, keberhasilan suatu program tidak lagi diukur dari tingginya tingkat penyerapan anggaran, tetapi dari sejauh mana anggaran tersebut mampu menghasilkan keluaran dan dampak yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penganggaran berbasis kinerja mendorong pemerintah menyusun indikator yang terukur dan relevan sebagai alat evaluasi sekaligus dasar penyusunan kebijakan pada periode berikutnya.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa sistem ini mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Anggraeni dan Saleh menjelaskan bahwa keterkaitan antara anggaran dan indikator kinerja memungkinkan evaluasi terhadap efektivitas penggunaan dana publik. Sementara itu, Mariandini et al. (2018) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh komitmen pimpinan, budaya organisasi, kompetensi sumber daya manusia, serta dukungan sistem informasi.

Di sisi lain, implementasi penganggaran berbasis kinerja masih menghadapi berbagai tantangan. Penyusunan indikator yang belum sepenuhnya mencerminkan hasil pembangunan, keterbatasan integrasi antara data keuangan dan data kinerja, serta minimnya pemanfaatan laporan keuangan dalam evaluasi program menyebabkan efektivitas sistem belum optimal. Kondisi tersebut mengakibatkan proses pengambilan keputusan belum sepenuhnya didasarkan pada informasi yang komprehensif.

Oleh karena itu, keberhasilan penganggaran berbasis kinerja tidak hanya bergantung pada kualitas indikator maupun perencanaan anggaran, tetapi juga pada ketersediaan informasi keuangan yang akurat. Integrasi dengan akuntansi berbasis akrual menjadi faktor penting agar evaluasi program dapat dilakukan secara lebih objektif, sehingga pengelolaan keuangan publik menjadi lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada hasil.

3.4 Peran Akuntansi Berbasis Akrual dan Penganggaran Berbasis Kinerja dalam Mendukung Akuntabilitas Publik

Akuntansi berbasis akrual dan penganggaran berbasis kinerja merupakan dua komponen utama dalam reformasi pengelolaan keuangan sektor publik yang memiliki fungsi berbeda, namun saling melengkapi. Akuntansi berbasis akrual menyediakan informasi mengenai kondisi keuangan pemerintah secara menyeluruh, sedangkan penganggaran berbasis kinerja memastikan bahwa penggunaan anggaran diarahkan pada pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, kedua sistem perlu dipandang sebagai satu kesatuan yang mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel.

Informasi yang dihasilkan melalui akuntansi berbasis akrual menjadi dasar dalam penyusunan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi anggaran. Berbeda dengan basis kas yang hanya mencatat transaksi saat kas berpindah, sistem akrual mampu memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai aset, kewajiban, pendapatan, dan beban pemerintah. Informasi tersebut kemudian dimanfaatkan dalam penganggaran berbasis kinerja untuk menilai efektivitas penggunaan anggaran serta tingkat pencapaian program pembangunan.

Integrasi kedua sistem menghasilkan proses pengambilan keputusan yang lebih berkualitas karena evaluasi tidak hanya mempertimbangkan besarnya anggaran yang digunakan, tetapi juga manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan keuangan pemerintah tidak lagi berorientasi pada kepatuhan administratif semata, melainkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, efisiensi penggunaan sumber daya, dan pencapaian tujuan pembangunan. Sinergi antara akuntansi berbasis akrual dan penganggaran berbasis kinerja

menjadi fondasi penting dalam memperkuat akuntabilitas publik serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern dan berkelanjutan.

Tabel 2. Faktor Pendukung dan Tantangan Implementasi Integrasi Akuntansi Berbasis Akrual dan Penganggaran Berbasis Kinerja

Aspek	Faktor Pendukung	Tantangan	Implikasi
Regulasi	Kerangka regulasi yang mendukung implementasi SAP berbasis akrual dan penganggaran berbasis kinerja	Implementasi regulasi belum seragam pada seluruh instansi	Diperlukan penguatan pengawasan dan evaluasi implementasi
Sumber Daya Manusia	Kompetensi aparatur meningkat melalui pendidikan dan pelatihan	Kualitas SDM belum merata	Peningkatan kapasitas aparatur secara berkelanjutan
Teknologi Informasi	Sistem informasi mendukung integrasi data keuangan dan data kinerja	Sistem masih terpisah pada beberapa instansi	Pengembangan sistem informasi yang terintegrasi
Organisasi	Komitmen pimpinan dan budaya organisasi mendukung reformasi	Resistensi terhadap perubahan	Penguatan kepemimpinan dan budaya kerja
Pengelolaan Kinerja	Indikator kinerja menjadi dasar evaluasi program	Indikator masih berorientasi pada <i>output</i>	Penyempurnaan indikator menuju pengukuran <i>outcome</i>

Hasil analisis pada Tabel 2 menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual yang terintegrasi dengan penganggaran berbasis kinerja dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung. Aspek seperti regulasi yang memadai, kompetensi sumber daya manusia, sistem informasi yang terintegrasi, komitmen organisasi, serta indikator kinerja yang relevan menjadi elemen penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan sektor publik yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan kapasitas aparatur, belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi, serta indikator kinerja yang masih berorientasi pada keluaran (*output*) dibandingkan hasil (*outcome*). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa reformasi pengelolaan keuangan publik masih memerlukan penyempurnaan secara berkelanjutan. Berdasarkan sintesis literatur, keberhasilan integrasi antara sistem akuntansi dan penganggaran tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis, tetapi juga oleh kesiapan kelembagaan dan tata kelola organisasi. Oleh sebab itu, penguatan kapasitas institusi, peningkatan kompetensi aparatur, serta pengembangan sistem manajemen kinerja menjadi langkah strategis agar informasi keuangan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam pengambilan keputusan dan mampu memperkuat akuntabilitas publik.

4. Conclusion

Penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi akuntansi berbasis akrual dan penganggaran berbasis kinerja merupakan pendekatan yang efektif dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan sektor publik di Indonesia. Akuntansi berbasis akrual menyediakan informasi keuangan yang lebih komprehensif sebagai dasar pengambilan keputusan, sedangkan penganggaran berbasis kinerja memastikan bahwa penggunaan anggaran berorientasi pada pencapaian hasil dan tujuan pembangunan. Sinergi kedua sistem tersebut mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. Keberhasilan implementasinya tidak hanya ditentukan oleh aspek regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi, sistem informasi yang terintegrasi, serta indikator kinerja yang berorientasi pada *outcome*. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan dan optimalisasi pemanfaatan informasi keuangan menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pelayanan publik. Penelitian ini masih terbatas pada pendekatan studi literatur. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya disarankan melakukan kajian empiris melalui

pendekatan kuantitatif, kualitatif, atau *mixed methods* untuk menguji implementasi integrasi kedua sistem pada instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Reference

1. Akbar, R. (2018). Pengukuran kinerja dan akuntabilitas publik di Indonesia: Studi awal di pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi dan Akuntabilitas Publik*, 1(1), 1-16. <https://doi.org/10.22146/jaap.35332>
2. Anggraeni, F., & Saleh, S. A. (2020). Pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Studi pada satuan kerja perangkat daerah Kota Bandung). *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 36-44. <https://doi.org/10.35313/iarj.v1i1.2358>
3. Bastian, I. (2019). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar* (Edisi 3). Erlangga.
4. Fahlevi, H., Irsyadillah, I., Arafat, I., & Adnan, M. I. (2022). The inefficacy of accrual accounting in public sector performance management: Evidence from an emerging market. *Cogent Business & Management*, 9(1), Article 2122162. <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2122162>
5. Halim, A., & Kusufi, M. S. (2020). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah* (Edisi 5). Salemba Empat.
6. Ibrahim, P., & Akbar, R. (2014). Studi komparatif penerapan akuntansi akrual pada pemerintah daerah: Pendekatan riset campuran. *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 2(3). <https://doi.org/10.22146/abis.v2i3.59362>
7. Mahsun, M. (2020). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik* (Edisi 2). BPFE Yogyakarta.
8. Maqdluyan, R. (2022). Determinan implementasi akuntansi akrual terhadap akuntabilitas sektor publik: Teori institusional. *Jurnal Wawasan Manajemen*, 10(3), 198-203. <https://doi.org/10.20527/jwm.v10i3.218>
9. Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik* (Edisi Revisi). Andi Offset.
10. Mariandini, F. I., Irianto, G., & Nurkholis. (2018). Institutionalization of performance accountability system for government institutions in Malang City Government. *Jurnal Economia*, 14(1), 44-58. <https://doi.org/10.21831/economia.v14i1.15418>
11. Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2020). *Akuntansi Sektor Publik* (Edisi 3). Salemba Empat.
12. Pemerintah Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*.
13. Pemerintah Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
14. Susanto, A. A., & Halim, A. (2018). Efek ratchet pada anggaran pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi dan Akuntabilitas Publik*, 1(1), 89-103. <https://doi.org/10.22146/jaap.35337>
15. Tarigan, E. P. A., & Nurtanzila, L. (2015). Standar akuntansi pemerintahan dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)*, 19(1), 1-16. <https://doi.org/10.22146/jkap.6847>